

# EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN PEDESAAN DI DESA KAUNERAN 1 KECAMATAN SONDER

APRILIA OLBATA  
JOORIE M. RURU  
NOVIE PALAR

*Abstract: The implementation of the Rural Development Program is one form of the government in developing villages. With rural development, it is expected that a change will occur in various aspects, including efforts to improve the welfare of the community through the pace of economic growth. The purpose of this study is to determine the level of effectiveness and the factors that influence it. To measure the level of effectiveness, researchers use three measures of effectiveness according to Ducan, who is quoted by Richard M. Steers in his book "Organizational Effectiveness" (2005), namely the level of achievement of objectives, integration, and adaptation to the Effectiveness of the Implementation of Rural Development Programs in Kauneran 1 Village, Sonder District. Researchers strive to be able to observe and analyze the development progress that has been planned. Among them by observing based on the results of interviews of 15 informants who are the village government, community figures, religious leaders, and the surrounding community. Based on the results of the study, it can be seen that with the development of the right target, it has increased the pace of the economy in the local community.*

*Keywords : Effectiveness, Rural Development.*

## PENDAHULUAN

Dari pengalaman-pengalaman pelaksanaan sejumlah program pembangunan pedesaan dengan beberapa penyebab kegagalannya mengundang sejumlah pertanyaan mendasar tentang apa sesungguhnya pembangunan pedesaan itu, pembangunan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa, tapi apakah masyarakat desa ikut terlibat secara penuh dan mendapatkan manfaat sehingga hasil pelaksanaan berbagai program pembangunan pedesaan telah efektif mengubah taraf kesejahteraan masyarakat desa. Sejalan dengan pernyataan diatas, maka pembangunan pedesaan yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan tidak dapat berjalan begitu saja tanpa didukung oleh partisipasi masyarakat. Salah satu masalah mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan.

Partisipasi anggota masyarakat adalah ketertiban anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam

perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan dalam masyarakat lokal. Dimaklumi bahwa anggaran pembangunan yang tersedia adalah relatif terbatas sedangkan program/proyek pembangunan yang dibutuhkan (yang telah direncanakan) jumlahnya relatif banyak, maka perlu dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi pembangunan program/proyek di masyarakat. Maka keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluasi hasil pembangunan sangat penting utamanya di tingkat desa.

Efektivitas pelaksanaan program pembangunan di desa Kauneran I masih terdapat masalah-masalah, keterbatasannya infrastruktur sudah menjadi masalah yang lama dihadapi oleh pemerintah terutama dalam pembangunan pedesaan. Infrastruktur yang terbatas menyebabkan terganggunya sistem pemerintahan di pedesaan, ini merupakan suatu masalah yang serius. Di desa Kauneran 1 belum memiliki kantor desa sehingga aktivitas dari Kepala Desa dan perangkat masih berlangsung di rumah

Kepala Desa, saat ini sementara di bangun kantor desa tetapi sudah 5 tahun namun belum selesai juga. Berdasarkan apa yang dapat penulis lihat, maka penulis ingin menguraikan permasalahan yang mengakibatkan pembangunan di desa Kauneran 1 seperti tidak berjalan secara baik, yang di jumpai bahwa fokus pembangunan hanya pada pembangunan sarana prasarana yang bersifat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan demikian seperti halnya pemerintah kehilangan fokus untuk menyelesaikan gedung kantor desa yang sebenarnya menjadi pusat pemerintahan, pusat pelayanan masyarakat, dan pusat kemasyarakatan. Peneliti memperhatikan berbagai pembangunan yang sementara di laksanakan di antaranya pembangunan jalan setapak, pembangunan drainase, pembangunan pengerasan jalan, pembangunan betonisasi jalan, pembangunan penampungan bak air bersih serta pengadaan air bersih guna mencukupkan konsumsi air bersih bagi masyarakat. Dengan demikian ada berbagai kendala dan permasalahan yang mendorong terjadinya pembangunan akibat desakan masyarakat yang bersumber dari aspek kebutuhan bagi masyarakat desa dan Hukum tua kurang beradaptasi dengan masyarakat sehingga masyarakat bermasa bodoh dalam setiap pembangunan di desa Kauneran 1.

Berdasarkan penelitian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan dan kendala yang menyangkut dengan Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Pedesaan di Desa Kauneran 1.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Konsep Efektivitas**

#### **1. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (view point) dan

dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Menurut Mahmudi (2005:92) Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan.

Moenir (2006:166) Efektivitas, pada sisi lain, menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran untuk melaksanakan. Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa efektivitas lebih memfokuskan pada akibat atau pengaruh sedangkan efisiensi menekankan pada ketepatan mengenai sumber daya, yaitu mencakup anggaran, waktu, tenaga, alat dan cara supaya dalam pelaksanaannya tepat waktu. Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan (2005:105) dalam bukunya Transformasi Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: "Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya."

Efektivitas merupakan keadaan yang berpengaruh terhadap suatu hal yang berkesan, kemanjuran, keberhasilan usaha, tindakan ataupun hal yang berlakunya. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Supriyono (200:29) dalam bukunya Sistem Pengendalian Manajemen mendefinisikan pengertian efektivitas, sebagai berikut: "Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut." Dengan demikian efektivitas merupakan suatu tindakan yang mengandung

pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan.

## 2. Ukuran Efektivitas

Keluaran (output) yang dihasilkan lebih banyak bersifat keluaran (output) tidak berwujud (intangible) yang tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil (outcome) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif (berdasarkan pada mutu) dalam bentuk pernyataan saja (judgement), artinya apabila mutu yang dihasilkan baik, maka efektivitasnya baik pula. Menurut Duncan dalam bukunya Richard M. Steers (2005) mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- (a) Pencapaian Tujuan
- (b) Integrasi
- (c) Adaptasi

## B. Konsep Pembangunan Desa

### 1. Definisi Pembangunan

Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman. Menurut Siagian (2006) Menurutnya suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa Negara. Menurut Deddy T. Tikson (2005) Bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Menurut Effendi (2002:2) pembangunan ialah suatu upaya

meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan.

2. Ruang Lingkup Pembangunan Pedesaan  
Pengembangan pedesaan mempunyai ruang lingkup sebagai berikut

- (a) Pembangunan sarana prasarana pedesaan
- (b) Pemberdayaan masyarakat
- (c) Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia
- (d) Penciptaan lapangan kerja, kesempatan, pendapatan khususnya pada masyarakat miskin

### 3. Ciri-Ciri dan Prinsip Pembangunan Pedesaan

Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan artinya harus melibatkan semua komponen yaitu dari pihak masyarakat dan pemerintah, dan harus langsung secara terus menerus demi tercapainya kebutuhan pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip-prinsip yaitu:

- (a) Transparansi
- (b) Partisipatif
- (c) Dapat dinikmati masyarakat
- (d) Dapat dipertanggungjawabkan
- (e) Berkelanjutan

### 4. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa

Tujuan pembangunan desa dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (1), yaitu “meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.” Tujuan pembangunan pedesaan jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan

kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Tujuan pembangunan pedesaan jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. Sasaran pembangunan pedesaan adalah terciptanya:

- (a) Peningkatan produksi dan produktivitas
- (b) Percepatan pertumbuhan desa
- (c) Peningkatan keterampilan dalam berproduksi dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif.
- (e) Peningkatan prakarsa dan partisipasi masyarakat.
- (f) Perkuatan kelembagaan.

### C. Konsep Desa

Pengertian desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan hormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, Kepala Desa adalah pemimpin desa yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksana pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

#### 1. Wewenang Pemerintah Desa

- (a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
- (b) Mengajukan rancangan peraturan desa.
- (c) Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- (d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.

- (e) Membina kehidupan masyarakat desa.
- (f) Membina perekonomian desa.
- (g) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- (h) Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.

#### 2. Tugas Pemerintah Desa

- (a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (b) Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- (c) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (d) Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- (e) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- (f) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- (g) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang undangan.
- (h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
- (i) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- (j) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- (k) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- (l) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa

### METODE PENELITIAN

Metode ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Informan yaitu 1 orang Hukum Tua, 1 orang Sekertaris Desa, 2 orang Badan Permusyawaratan Desa, 4 orang Aparatur Desa, 4 orang Tokoh Masyarakat, dan 3 orang Masyarakat. Teknik Pengumpulan Data yang dipakai yaitu Teknik Wawancara, Teknik Pengamatan/Obsevasi, dan Teknik Dokumentasi. Serta Teknik

Analisis yang di pakai yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, serta Penarik Kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Wawancara

Berdasarkan deskriptif dari hasil wawancara dengan narasumber di atas, maka berikut adalah rangkuman dari semua narasumber berdasarkan indikator :

- (a) “Pencapaian tujuan di desa kauneran 1, dapat dilihat dari hasil akhir dan dampak yang di timbulkannya, baik dampak positif dan dampak negatif. Dari segi dampak positif ialah dapat menunjukkan kinerja pemerintah dalam membangun desa dan menyejahterakan masyarakat, sekalipun kinerja yang di dihasilkan belum begitu luarbiasa hasilnya. Dengan demikian dapat terlihat tingkat keberhasilan pemerintah desa dalam mencapai tujuan. Positifnya ialah banyak pekerjaan dalam desa yang sudah terlihat hasilnya baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik. Namun dari segi negatifnya telah muncul beberapa penilaian dari masyarakat tentang pelaksanaan program pembangunan di desa terhenti atau kualitas pembangunannya tidak bertahan lama. Namun yang menjadi permasalahan adalah kurangnya pergerakan pemerintah untuk mendorong masyarakat supaya dapat bersama-sama mendanai pembangunan gedung kantor desa yang adalah pusat kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan di desa.
- (b) “Dengan konsep integrasi yang baik, telah menjadi bagian dasar dalam menentukan pembangunan yang tepat sasaran. Pemerintah dan masyarakat perlu adanya saling komunikasi yang baik untuk tercapainya tujuan. Proses sosialisasi dalam menentukan visi kedepan sangat mempengaruhi kemajuan dan kesejahteraan di desa Kauneran 1. Proses panjang dalam mensosialisasikan adalah penentu untuk terlaksananya pencapaian tujuan, sehingga dengan pengaruh dari

sosialisasi merupakan faktor yang paling utama. Dalam hal ini dapat dilihat kurangnya sosialisasi dalam menentukan proses pembangunan yang dalam hal ini pendanaanya bersumber dari swadaya masyarakat.

- (c) “Adaptasi merupakan kemampuan dari organisasi untuk menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Hal ini juga merupakan bagian yang utama dalam mencapai tingkat keberhasilan dari visi yang ada di desa Kauneran 1. Misalkan pembangunan drainase air untuk pengairan air menuju sawah-sawah masyarakat. Ini membutuhkan perhitungan yang tepat untuk mengukur kemiringan tanah agar dapat memberi kekuatan volume air yang cukup untuk mengairi sawah, sehingga dengan pengairan yang baik akan menambah keunungan pada masa panen. Untuk itu akan menambah pendapatan dari para petani sawah. Oleh sebab itu pemerintah harus mampu menyesuaikan setiap keputusan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat dan harus mampu menyesuaikan pembangunan berdasarkan dana yang tersedia sehingga dapat memeberi hasil yang maksimal. Telah dilihat bahwa adaptasi terjadi karena adanya perubahan-perubahan yang terjadi dengan sendirinya atau akibat dari adanya campur tangan dari pihak-pihak tertentu. Sehingga jika adaptasi yang baik dari pemerintah maka akan ada pembaharuan-pembaharuan untuk memperbaiki dan melengkapi suatu objek yang belum baik menjadi lebih baik lagi.

### Pembahasan

Berdasarkan penjelasan pada sub-bab analisis deskripsi hasil penelitian, selanjutnya peneliti akan membahas mengenai bagaimana pencapaian tujuan, pengintegrasian, dan adaptasi dari pelaksanaan program pembangunan pedesaan di desa Kauneran 1 Kecamatan Sonder.

(a) Pencapaian Tujuan Dari Pelaksanaan Program Pembangunan Pedesaan

Agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu : Kurun waktu, sasaran yang merupakan target kongkrit, dan dasar hukum. Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya dalam mencapai tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses. Tujuan yang hendak dicapai oleh pelaksanaan program pembangunan pedesaan di desa Kauneran 1 ialah dengan tercapainya pembangunan yang dapat memajukan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk terciptanya kemajuan yang signifikan di desa Kauneran 1. Berdasarkan dari segi waktu , sasaran atau target yang konkrit, maka pada dasarnya dapat di lihat bahwa pembangunan di desa Kauneran 1 dominan sudah pada tahap pencapaian. Dengan memperhatikan setiap program yang lahir dari aspirasi masyarakat yang akhirnya tertuang dalam keputusan pemerintah desa, sehingga dengan terealisasinya bentuk-bentuk pembangunan yang sudah tercapai berdasarkan program maka dengan demikian program pembangunan di desa Kauneran 1 belum berada pada tahap pencapaian target secara konkrit.

(b) Integrasi terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan Pedesaan

Dalam penelitian ini integrasi mempunyai pengertian pengukuran terhadap prosedur dan tingkat kemampuan organisasi untuk mengadakan sosialisasi tentang program pembangunan pedesaan di desa Kauneran 1. Untuk itu dengan adanya sosialisasi maka akan menumbuhkan kerjasama antara pemerintah desa bersama dengan masyarakat setempat. Sosialisasi yang baik akan menunjang kelangsungan dan keberhasilan dari setiap program yang di rencanakan. Pada umumnya masyarakat desa Kauneran 1 sudah mengetahui bentuk-bentuk

pembangunan yang layak untuk dilaksanakan, namun di dasari pada tingkat pendidikan yang tidak merata maka dapat dimungkinkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang program pembangunan pedesaan berdasarkan sumber pendanaan setiap program pembangunan, maka sangat di perlukan transparansi pemerintah dalam mensosialisasikan berbagai kegiatan pembangunan yang tepat sasaran berdasarkan kebutuhan di lingkungan masyarakat. Pemerintah desa telah memfasilitasi masyarakat lewat sosialisasi untuk penetapan pelaksanaan program pembangunan pedesaan di forum Musrenbang jaga yang bertujuan untuk memberikan kesempatan secara terbuka bagi masyarakat untuk menyalurkan pendapat, aspirasi, serta usulan yang nantinya akan di pertimbangan dalam forum rapat Musrenbang. e

(c) Adaptasi terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan Pedesaan

Adaptasi atau penyesuaian diri ialah tingkat dimana organisasi dapat benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal. Sehingga dapat di simpulkan bahwa adaptasi merupakan penyusunan strategi dalam menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi untuk dapat dalam menentukan objek yang tepat. Adaptasi yang di lakukan pemerintah desa Kauneran 1 dengan melihat perubahan-perubahan di sekitar lingkungan masyarakat, sehingga dapat menentukan pelaksanaan proses pembangunan yang tepat sasaran. Penyesuaian dengan keadaan sangat mendukung akan tercapainya tujuan. Hal ini perlu di imbangi dengan strategi-strategi yang tepat sasaran dan mampu membawa perubahan secara cepat di lingkungan masyarakat. Sehingga dari penelitian penulis dapat memahami pentingnya adaptasi pemerintah dalam perlaksanaan program pembangunan pedesaan sehingga tercapainya efektivitas dalam pembangunan di desa dengan tujuan utama mensejahterakan masyarakat.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- (a) Pada dasarnya Pelaksanaan Program Pembangunan Pedesaan di Desa Kauneran 1 Kecamatan Sonder sudah berjalan baik namun belum mencapai pada tahap efektif. Karena dilihat dari berbagai pembangunan di desa Kauneran 1 , masih terdapat pembangunan yang belum selesai selama bertahun- tahun.
- (b) Hukum Tua dan pemerintah desa harus menjadi penggerak dan harus lebih trampil dalam menerapkan dan membangun strategi pembangunan yang tepat sasaran dan berguna untuk penningkatan perekonomian di masyarakat. Adanya pembangunan tepat sasaran maka dapat di lihat bahwa tingkat perekonomian masyarakat bertumbuh pesat sehingga siklus laju perekonomian semakin meningkat. Sehingga tujuan dari pembangunan desa dapat tercapai.
- (c) Pemerintah harus transparansi dalam melibatkan masyarakat untuk memecahkan masalah yang ada di desa, lewat komunikasi dan sosialisasi yang baik dengan masyarakat agar masyarakat dapat melibatkan diri dan bekerja sama dengan pemerintah guan melanjutkan pembangunan yang terhenti di desa Kauneran 1

### Saran

Untuk meningkatkan kualitas pembangunan, kiranya perlu diperhatikan beberapa hal yang sekiranya perlu diperhatikan di kemudian hari :

- (a) Pemerintah desa perlu menjadi motor penggerak yang harus bergerak secara aktif untuk menggerakkan masyarakat supaya berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan program pembangunan desa

yang tidak di fasilitasi oleh pemerintah pusat. Diantaranya dengan membangun kebijakan baru agar dapat melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan yang terhenti lewat sumber dana dari swadaya masyarakat.

- (b) Pentingnya respon masyarakat untuk menyikapi dan berperan aktif dalam melanjutkan pembangunan yang terhenti akibat dana yang tidak memadai, agar supaya dengan segera di lanjutkan demi kesejahteraan bersama. Dalam hail ini khusus untuk pembangunan yang tidak di danai oleh pemerintah, yang sumber pendanaanya berasal dari swadaya masyarakat.
- (c) Pemerintah dan masyarakat perlu berkerja sama dalam menjaga dan mengawasi fasilitas publik yang di bangun di desa, agar masa pakainya sesuai dengan target masa pakai saat awal program perencanaan pembanguan ditetapkan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Hariantja, Effendi. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pengadaan Pengembangan, Pengkompensasian, dan Peningkatan Produktivitas Pegawai*. Jakarta: Grafindo.
- Kurniawan. 2005. *Trasformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP.YKPN.
- Moenir. 2006. *Manajemen Pelayanajn Umum di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi.
- Siagian. 2006. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT Bumi
- Steers. R. 2005. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Erlangga
- Sugiyono. 2016, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Supriyono. 2000. *Akuntansi Biaya Perencanaan dan Pengendalian Biaya Serta Pembuatan Keputusan*. Yogyakarta:BPFE.

Tikson, T. Deddy. 2005. *Administrasi  
Pembangunan*. Makassar: Gemilang  
Persada.

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004  
tentang Pemerintah Daerah 2  
Undang-Undang Desa Pasal 78 tentang  
Pembangunan Desa 1

SUMBER-SUMBER LAINNYA